

## ABSTRAK

Pernikahan pada hakekatnya memiliki tujuan yang mulia antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan dapat terjadi apabila ada keinginan dari kedua belah pihak untuk bekerjasama membangun suatu rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sah di mata hukum dan agama. Namun dalam beberapa fakta yang ada di kehidupan nyata, pernikahan tanpa adanya komitmen yang kuat antar kedua belah pihak dapat membawa kesengsaraan di dalam rumah tangga yang telah berlangsung. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PISAH HARTA YANG DIBUAT DENGAN AKTA OTENTIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (2) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik bagi kedua belah pihak (3) Apa kelemahan-kelemahan dan solusi dari akibat hukum perjanjian pisah harta yang dibuat dengan akta otentik menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan yuridis dengan jenis penelitian deskriptif analisis, dan lokasi penelitian yang penulis ambil adalah diwilayah Semarang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa peraturan mengenai perjanjian perkawinan dalam hal ini adalah perjanjian pisah harta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk saat ini perjanjian pisah harta masih dianggap tabu dan asing bagi masyarakat Indonesia karena bertentangan dengan nilai ketimuran yang penuh dengan etika sehingga masih belum banyak masyarakat umum yang membuat perjanjian pisah harta. Selain memiliki banyak keuntungan perjanjian pisah harta juga memiliki beberapa kekurangan namun ada beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak negatif atau kekurangan dari perjanjian pisah harta tersebut. Dampak tersebut adalah sifat perjanjian yang kaku, perjanjian batal apabila salah satu pihak meninggal dunia, perlu penjelasan yang teliti dan spesifik dari notaris kepada para pihak, diperlukan surat wasiat untuk menggantikan perjanjian pisah harta apabila salah satu pihak meninggal. Maka yang perlu diingat oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian pranikah harus memperhitungkan dengan seksama semua poin-poin yang akan dituangkan ke dalam isi perjanjian tersebut agar tidak menjadi bomerang mempersulit diri mereka sendiri dikemudian hari.

---

Kata Kunci: **Perjanjian, Pisah Harta, Akta Otentik.**

## ABSTRACT

*Marriage basically has a noble purpose between the two parties, both men and women. Marriage can occur if there is a desire from both parties to work together to build a household in legal marriage ties in the eyes of the law and religion. But in a few facts that exist in real life, marriage without a strong commitment between the two parties can bring misery in the household that has taken place. With this background, the writer is interested in taking the title "JURIDIC REVIEW OF SEPARATE TREATMENT AGREEMENT MADE WITH AUTHENTIC DICTION ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1974 ABOUT MARRIAGE" by raising the formulation of the problem as follows (1) authentic deed according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage (2) What are the legal consequences of the asset split agreement made with an authentic deed for both parties (3) What are the weaknesses and solutions of the legal consequences of a separate property agreement made with an authentic deed according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage. This research was made using jurisdiction with descriptive analysis type of research, and the location of the study that the authors took was in Semarang. The results of this study note that the regulations regarding marriage agreements in this case are the asset split agreement which has been regulated in Law number 1 of 1974 and the Civil Code, for now the asset split agreement is still considered taboo and foreign to Indonesian people because it is contrary to eastern values are full of ethics so that there are still not many common people who make agreements to separate property. Apart from having many advantages, a separate property agreement also has several drawbacks, but there are a number of solutions that can be taken to reduce the negative impact or lack of a separate property agreement. The impact is the rigid nature of the agreement, the agreement is canceled if one party dies, it needs a careful and specific explanation from the notary to the parties, a will is needed to replace the asset split agreement if one party dies. So what needs to be remembered by the parties who want to make a prenuptial agreement must carefully take into account all the points that will be poured into the contents of the agreement so that it does not become a boomerang complicating themselves in the future.*

---

Key words: **Agreement, Separation of Assets, Authentic Deed.**